

u ini memperlihatkan bahwa persoalan pemenuhan air bersih bagi warga bukan hanya persoalan is belaka yang menjadi ranahnya para insinyur dan para tukang. Sebaliknya penyediaan fasilitas ersih meliputi beragam aspek sosial dan politik. Tanpa ketrampilan pengelolaan hal tersebut, ya pemenuhan kebutuhan dasar ini akan berujung pada kegagalan. Secara akademik penggunaan pendekatan atau perspektif atas persoalan lintas disiplin ini tidak mencukupi kalau hanya kukan dari satu disiplin keilmuan saja (teknis saja, atau sosial saja). Pemahaman penyediaan air sih membutuhkan pendekatan multi disiplin, baik untuk keperluan analisa, maupun untuk erluan praktis implementasi kebijakan di lapangan. Dari buku ini kita belajar bagaimana para ahli m beragam ilmu perlu saling berkolaborasi guna memastikan impian warga akan pemenuhan air sih dapat berlangsung.

linda Savirani, Ph.D
ala Prodi S3 Ilmu Politik, Departemen Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM.



Politik Radikalisasi Air

Pathurrahman Kurnain
Siti Mauliana Hairini

Politik Radikalisasi Air

Permainan Dominasi Kuasa
Pengolahan Air Bersih
di Lahan Gambut



POLITIK RADIKALISASI AIR

Permainan Dominasi Kuasa Pengolahan Air Bersih di Lahan Gambut

POLITIK RADIKALISASI AIR

Permainan Dominasi Kuasa Pengolahan Air Bersih di Lahan Gambut

Pathurrahman Kurnain
Siti Mauliana Hairini



Politik Radikalisasi Air:

Permainan Dominasi Kuasa Pengolahan Air Bersih di Lahan Gambut

©Pathurrahman Kurnain & Siti Mauliana Hairini, 2021

Diterbitkan **Lambung Mangkurat University Press, 2021**

d.a. Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan ULM

Lantai 2 Gedung Perpustakaan Pusat ULM

Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, 70123

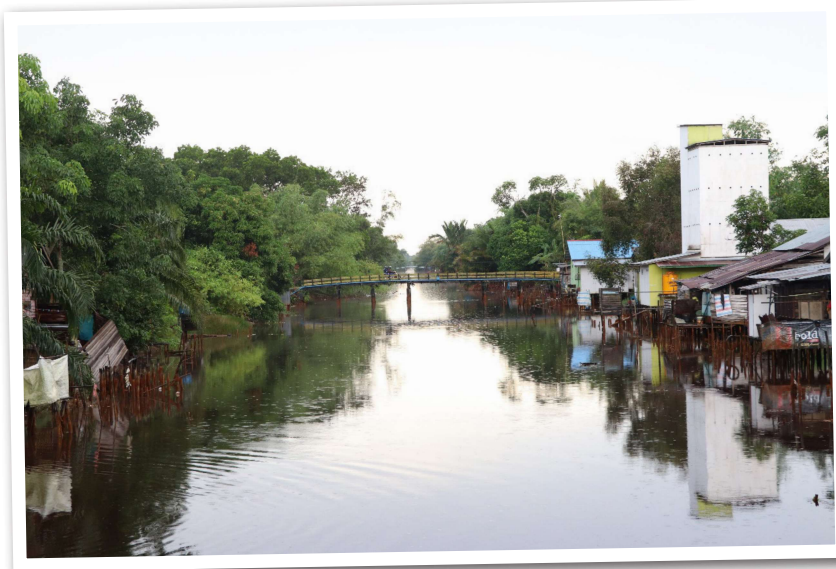
Telp/Fax. 0511-3305195

Anggota APPTI: No. 004.035.1.03.2018

xxvi + 156 hlm; 14.5 x 20.5 cm

Cetakan Pertama, Juli 2021

ISBN: 978-623-7533-66-5



*... bahkan, dalam persoalan peningkatan kualitas air pun,
nalar kekuasaan terus bekerja untuk menjamin keberhasilannya.*

PROLOG: Pesona Dinamika Politik Pedesaan di “Bumi Selidah”



H. Rahmadian Noor, S.T.
Wakil Bupati Barito Kuala

Assalamualaikum Wr. Wb.

Barito Kuala adalah kabupaten yang terletak di ujung barat Kalimantan Selatan yang memiliki 195 desa dengan potensi dan keunikannya tersendiri. Desa Jejangkit Timur merupakan salah satu desa yang telah berhasil menuliskan sejarahnya dalam bidang inovasi teknologi pengelolaan air. Karena bermukim di lahan gambut, warga Desa Jejangkit Timur sangat kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih, di mana kondisi air sungainya yang memiliki kadar asam yang tinggi serta berwarna coklat-kemerahan sehingga tidak layak konsumsi. Sementara itu, layanan PDAM di Kecamatan Jejangkit belum mampu

menjangkau distribusi air bersih hingga ke Desa Jejangkit Timur. Kami selaku pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Desa dan Masyarakat Jejangkit Timur yang telah berhasil membangun “PDAM berskala desa”, dengan memberikan penghargaan Inovasi Pembangunan Bidang Air Bersih, pada puncak hari jadi ke-59 Kabupaten Barito Kuala. Bahkan yang sangat menggembirakan, program pembangunan IPAB Jejangkit Timur saat ini telah menjadi model percontohan sekaligus wadah studi banding bagi pemerintah desa lainnya, baik yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala maupun desa-desa di kabupaten lainnya.

Proses pembangunan IPAB Jejangkit Timur ini memang tidaklah semudah membalikkan telapak-tangan. Salah satu tantangannya yakni pembangunannya yang bersifat swadaya dari desa, sementara anggaran yang digunakan berasal dari dana desa dengan jumlah yang relatif besar. Sehingga diperlukan kurun waktu dua tahun untuk merampungkan pembangunannya. Kami selaku pemerintah daerah tentunya juga sangat mendukung gagasan dari Muamar selaku Kepala Desa Jejangkit Timur terhadap pembangunan IPAB Jejangkit Timur dengan memberikan persetujuan penggunaan dana desa untuk pembiayaannya.

Menariknya, pembangunan IPAB Jejangkit Timur ini ternyata juga mendorong minat Pathurrahman Kurnain selaku akademisi Politik-Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, untuk meneliti praktik relasi kuasa yang berlangung di balik pembangunan IPAB tersebut, sekaligus mengembangkannya menjadi buku yang berada di tangan para pembaca saat ini. Kami juga turut menyambut baik, Barito Kuala kerap dijadikan lokasi penelitian oleh

sdr. Pathurrahman Kurnain, di mana sepanjang yang kami ketahui, yang bersangkutan memiliki minat yang besar dalam topik-topik riset politik pedesaan dan politik kepemiluan di “Bumi Selidah” Barito Kuala.

Kami berharap, semoga buku ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan aparaturnya desa pada khususnya, serta berbagai pihak yang memiliki minat terhadap dinamika politik lokal pada umumnya. Semoga buku ini menjadi pintu pembuka bagi sdr. Pathurrahman Kurnain untuk melanjutkan penulisan seri buku-buku politik-pemerintahan berikutnya yang berlatar Barito Kuala.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

H. Rahmadian Noor, S.T.

Wakil Bupati Barito Kuala

MUKADIMAH

Menarik Kembali Urgensi Kehadiran Studi-Studi Ekologi-Politis dalam Membaca Kehidupan Masyarakat Desa

Buku yang ada di tangan pembaca ini dikembangkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dalam mencermati konstelasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) di Desa Jejangkit Timur, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala yang tidak hanya dinamis tetapi juga menyimpan fenomena politis untuk diungkap. Desa Jejangkit Timur merupakan contoh kasus bagaimana pemerintah desanya berhasil menangani permasalahan krisis air bersih. Walaupun secara geografis Desa Jejangkit Timur berada di daerah rawa yang memiliki sumber daya air yang melimpah, namun menurut Moehansyah dalam Chandrawidjaya (2001) kualitas airnya tidak sesuai dengan pertanian dan pemukiman (air minum). Sejak tahun 1996 masyarakat Desa Jejangkit Timur semakin merasakan penurunan kualitas air sumur maupun sungai yang mengalir di desa mereka akibat proyek pengerukan tanggul dan maraknya perkebunan kelapa sawit. Air sungai di Desa Jejangkit Timur berwarna coklat-kemerahan serta

terasa asam dengan kadar asam (pH) sangat tinggi yang mencapai angka 3,0 di musim penghujan dan dimusim kemarau bisa mencapai 2,0. Pada normalnya kadar keasaman (pH) air yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar pada angka 6,5 hingga 8,5. Tingginya kadar pH air sungai ini menimbulkan berbagai permasalahan yang sering dikeluhkan warga seperti airnya yang tidak layak konsumsi, terasa perih bila digunakan untuk mencuci muka ataupun terkena kulit yang luka, hingga hasil cucian juga meninggalkan noda kuning, khususnya pada pakaian yang berwarna putih.

Karena layanan distribusi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Jejangkit belum mampu menjangkau hingga ke Desa Jejangkit Timur, untuk mendapatkan air yang layak untuk kebutuhan seperti minum dan memasak warga desa terpaksa memanfaatkan air hujan yang ditampung melalui wadah air yang sudah disediakan. Namun cara tersebut bukanlah solusi permanen, sebab jika musim kemarau warga desa kembali terpaksa menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan sehari-hari. Penggunaan air sumur juga tidak bisa menjawab permasalahan tersebut, sebab kualitas airnya juga tidak jauh berbeda dari air sungai. Akibatnya, warga desa terpaksa harus membeli air bersih dari pedagang air keliling yang mematok harga Rp7.000,- untuk 20 liter air bersih, sehingga setiap bulannya warga desa sedikitnya harus mengeluarkan biaya Rp100.000,- Rp150.000,- untuk membeli air bersih.

Namun sejak tahun 2018, masyarakat Desa Jejangkit Timur telah terbebas dari krisis air bersih. Pemerintah Desa Jejangkit Timur berhasil mengembangkan inovasi teknologi pengolahan air bersih

berskala desa, di mana proses desain konstruksi dan sistem distribusinya mengadaptasi sistem pengolahan air konvensional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) ini dibangun secara swadaya yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jejangkit Timur. Berdasarkan hasil riset evaluasi kinerja IPAB Jejangkit Timur, kapasitas produksi maksimalnya mencapai 4,9 liter/detik, yang mampu melayani konsumen hingga 1.256 sambungan pelanggan dengan pH mencapai 7,09 (Riduan & Dhiaksa, 2020). Melalui IPAB, BUMDes Jejangkit Timur mampu memperoleh keuntungan bersih hingga Rp4.000.000,-/bulan dengan menjual air bersih yang sangat terjangkau kepada warganya, dengan harga Rp7.000,-/kubiknya (Suyono, 2019). Atas prestasinya dalam mengatasi krisis air bersih melalui pembangunan IPAB, Desa Jejangkit Timur pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai Desa Inovatif dari Bupati Barito Kuala. Bahkan IPAB Jejangkit Timur juga menjadi rujukan studi banding bagi desa-desa di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang ingin membangun sistem pengolahan air.

Secara empiris, kebijakan pemerintah Desa Jejangkit Timur untuk membangun IPAB memiliki fenomena anomali. Meskipun proses perumusan kebijakannya bersandar pada model elitis yang didorong oleh kepala desa serta mendapat resistensi dari beberapa kelompok masyarakat yang ada di desa, namun uniknya hasil dari produk kebijakannya justru dinilai efektif dan diapresiasi oleh masyarakat Jejangkit Timur, bahkan berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Program pembangunan IPAB

ini tidak hanya memberikan perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat Desa Jejangkit Timur, tetapi juga inovatif dan memberikan harapan cerah terhadap berjalannya roda usaha BUMDes Jejangkit Timur. Kebijakan publik yang menunjukkan perbedaan nyata setelah dilaksanakan, serta cerdas dan memberikan harapan seperti inilah yang dikategorikan sebagai kebijakan publik yang unggul (Nugroho, 2002).

Keberhasilan program pembangunan IPAB dalam mengatasi krisis air bersih tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Muammar sebagai Kepala Desa Jejangkit Timur yang menjadi inisiator sekaligus implementator program. Selain menjabat sebagai kepala desa, Muammar juga dikenal sebagai pengusaha instalatir pengolahan air bersih. Sebagai sebuah program, proses pembentukan kebijakan pembangunan IPAB dilakukan dengan menggunakan pendekatan elitis, di mana Muammar selaku Kepala Desa memainkan dominasi kuasanya untuk mendorong pembangunan IPAB sebagai prioritas pembangunan desa dan mengontrol implementasi kebijakan tersebut (Pathurrahman, dkk., 2020). Selain menengarai masyarakat memiliki perilaku apatis dan tidak memiliki informasi yang baik tentang kebijakan publik, model kebijakan elitis juga mengedepankan pembentukan kebijakan berupa preferensi nilai-nilai elite penguasa dan bukan berasal dari tuntutan-tuntutan masyarakat (Dye, 1981; Zeigler, 1971).

Proses pembentukan kebijakan publik dengan pendekatan model elitis tidaklah sejalan dengan semangat desentralisasi politik dan demokratisasi masyarakat desa yang tercermin dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Prinsip tata kelola pemerintahan desa saat ini mengadopsi logika *Community Driven Development*

(CDD) versi Bank Dunia yang tertuang dalam *Urban Poverty Project* (Platteau dan Frederic, 2003), di mana menempatkan masyarakat desa sebagai objek sekaligus subjek pengelolaan pembangunan. Mekanisme ini mendorong ruang-ruang aksi kolektif masyarakat lokal untuk lebih luas terlibat dalam kontrol kebijakan publik yang berimplikasi terhadap demokratisasi di tingkat lokal, termasuk pada masyarakat pedesaan (Dasgupta dan Victoria, 2007). Namun di sisi lain, upaya-upaya desentralisasi politik dan demokratisasi yang ingin diperkuat dalam kehidupan masyarakat desa bukanlah tanpa konsekuensi. Salah satu resiko yang harus dihadapi yakni proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan ataupun program-program yang dilakukan membutuhkan banyak proses serta memerlukan pembentukan institusi-institusi baru untuk memastikan kemandirian masyarakat dapat tercapai (Furniss, 1974). Dalam konteks yang lebih pesimistik, walaupun desentralisasi politik dan arus demokratisasi terus digalakkan, dalam kenyataannya di Indonesia hal itu tidak berbanding lurus dengan harapan agar elite-predatoris (termasuk elite predatoris desa) bisa direduksi secara signifikan, sebab mereka sudah bertransformasi menjadi elite penentu kebijakan (Hadiz, 2005).

Oleh karenanya, buku ini hadir untuk menunjukkan bahwa meskipun demokratisasi terus ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan masyarakat desa, namun nyatanya persoalan cengkaman dominasi elite desa masih belum sepenuhnya bisa terselesaikan dengan baik. Dalam konteks inilah, buku yang anda baca ini disusun untuk menelisik bagaimana dominasi kuasa yang dimainkan oleh Muammar selaku Kepala Desa Jejangkit Timur untuk memastikan program

pembangunan IPAB yang digagasnya dapat terkontrol, ditengah resistensi dari berbagai kelompok masyarakat. Sehingga dalam buku ini penulis sampai pada keyakinan bahwa di Desa Jejangkit Timur, krisis air bukan terjadi karena ketiadaan air, namun karena air tidak dikelola dengan baik, dan aktifitas/proses tata kelola air ternyata tidak bisa dilepaskan dari unsur politisnya, di mana ada kuasa dominan yang bermain untuk menjamin dan mengontrol bekerjanya program “radikalisasi air”.

Selain itu, misi lain dari penulisan buku ini juga untuk menarik kembali urgensi kehadiran studi-studi Ekologi Politis dalam “membaca” kehidupan masyarakat desa. Ekologi Politis merupakan teori kritis untuk melakukan konfrontasi terhadap bentuk-bentuk peminggiran, dominasi, eksploitasi dan hierarki yang hidup dalam satu tatanan (Batubara, Bosman. 2017. Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi. Wacana 35: 3-23). Harapannya, melalui hasil kerjasama intelektual seperti inilah dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan desa dan masyarakat pedesaan, yang sebenarnya juga memiliki daya tarik besar untuk dicermati (beserta kompleksitas persoalan-persoalan yang melingkupinya) sehingga perlu dilakukan banyak kajian-kajian sosial-politik untuk menjelaskan berbagai macam dinamika kehidupan masyarakat desanya yang bergerak sangat dinamis. Sebab sebagaimana yang telah disampaikan Foucault (1988), peran intelektual sangatlah besar pengaruhnya dalam mengubah perspektif maupun pemikiran manusia.

Buku yang tersaji di hadapan pembaca ini terbagi menjadi beberapa bab. Pada bab pertama, mengangkat persoalan mendasar krisis air

bersih yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Desa Jejangkit Timur. Pada sub-bab berikutnya penulis akan memaparkan tantangan layanan pengolahan air bersih di Barito Kuala, sebagai kabupaten yang berada di ujung barat Kalimantan Selatan. Pada bagian akhir akan diuraikan bagaimana ancaman krisis air bersih yang terus mengintai di Indonesia, yang notabenehnya merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairannya mencapai lebih dari 70% dari total luas wilayah negaranya.

Pada bab kedua, mengulas bagaimana desa-desa menolak kalah dari permasalahan lingkungan yang tengah melanda. Tantangan masyarakat desa hari ini secara aktual yakni bagaimana mereka mampu secara mandiri menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang terus mengintainya. Salah satu contoh kongkrit permasalahan lingkungan yang terjadi yakni soal pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, udara dan tanah. Melalui rekognisi yang diberikan pemerintah melalui kebijakan UU Desa tersebut, desa harus mampu menjalankan *spirit local self-governmnet* secara bertanggung-jawab dan berkelanjutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengatasi berbagai ancaman kerusakan lingkungan melalui berbagai program inovasi-teknologi yang digagas oleh desa.

Bab ketiga, akan dipaparkan profil singkat Desa Jejangkit Timur dalam angka statistik. Selanjutnya profil Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAB) Jejangkit Timur dalam berbagai kategori, baik dari tahapan pengolahan air bersih, kapasitas produksi maksimal, analisis kuantitas air, dan lain sebagainya akan dipaparkan pada bab empat. Pada bab berikutnya, juga dijelaskan bagaimana geneologi IPAB Jejangkit Timur yang bermula dari petaka, hingga akhirnya menjadi

bonanza bagi masyarakatnya. IPAB yang dibuat Muammar bukanlah proyek penyediaan air bersih pertama di Desa Jejangkit Timur. Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Pedesaan. Namun program PAMSIMAS tersebut akhirnya harus dinyatakan gagal setelah beroperasi selama 6 bulan karena berbagai permasalahan yang melingkupinya. Berbekal dari kegagalan proyek PAMSIMAS inilah, pada akhirnya mendorong inovasi untuk membangun IPAB yang lebih kompatibel dengan kondisi masyarakat Desa Jejangkit Timur.

Pada bab keenam, buku ini berisi eksplanasi kendala-kendala yang yang harus di atasi oleh Muammar sebagai inisiator sekaligus pelaksana pembangunan IPAB Jejangkit Timur, seperti munculnya resistensi dari kelompok eksponen pendukung kompetitor Muammar dalam pilkades, kelompok masyarakat yang menginginkan prioritas pembangunan desa untuk perbaikan jembatan dan jalan desa, hingga kelompok masyarakat yang trauma terhadap program pembangunan sistem pengolahan air yang sebelumnya gagal.

KATA PENGANTAR

Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A.
FISIPOL, Universitas Gadjah Mada

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia dalam hidup. Sebanyak 70% tubuh manusia mengandung air. Orang bisa hidup tanpa makan dalam beberapa hari, tapi orang akan mati dalam beberapa hari tanpa minum air. Secara global, dunia memiliki lebih banyak lautan yang mengandung air, daripada daratan. Masalahnya air yang ada di laut ini tidak otomatis bisa dikonsumsi manusia. Berdasarkan data PBB, saat ini terdapat 2,2 miliar orang atau seperempat dari populasi dunia masih kekurangan akses air bersih. Pada tahun 2050 diproyeksikan permintaan air dunia mengalami peningkatan sebanyak 55 persen, kemudian defisit air 40 persen diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2030. Sementara itu, krisis air di masa mendatang diramalkan menjadi bencana alam dan akan mengurangi PDB sebanyak 6 persen di beberapa wilayah pada tahun 2050.

Kompetisi antar negara atas sumber air bersih terus meningkat. Ketimpangan ekonomi antara negara dan antar wilayah (Utara vs Selatan), ditandai juga oleh tinggi-rendahnya akses negara tsb terhadap

sumber air bersih. Makin kaya sebuah negara, makin tinggi akses terhadap sumber air bersih, dan sebaliknya. Beriringan dengan itu, proses komersialisasi air bersih melalui penyediaan air pipa, dan air dalam kemasan botol (AKB) terus berlangsung. Perusahaan air kemasan ini mengakses dan mendominasi air (biasanya atas izin negara) dari sumber mata air, yang sering kali juga merupakan sumber mata air milik warga. Kita makin sering mendengar gerakan warga yang menolak penguasaan sumber mata air oleh korporasi. Kesemua hal di atas menunjukkan bahwa air air tidak bisa dilepaskan dari kompetisi atasnya dan komersialisasi terhadapnya. Kompetisi dan komersialisasi adalah wujud dari bekerjanya kekuasaan (politik).

Buku ini menggali peran “*agency*”, seorang kepala desa, dengan pendidikan yang terbatas, tapi memiliki keuletan yang sangat tinggi, dalam memenuhi kebutuhan air bersih warganya di sebuah desa bernama Jejangkit Timur, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Desa ini dikenal sebagai wilayah dengan kadar keasaman air yang sangat tinggi, sehingga air di sana tidak layak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Warga mengandalkan sumber air bersih dari kegiatan menadah air hujan. Upaya yang dilakukan oleh sang kepala desa berada dalam konteks tingginya ketidakpercayaan (*distrust*) warga akibat kegagalan proyek PAMSIMAS yang sebelumnya pernah ada di desa. Tantangan lain adalah tingginya polarisasi sosial warga pasca Pilkades 2015, di mana sang kepala desa kita baru saja terpilih. Tidak hanya itu, urusan teknis menjadi politis. Warga antar-RT bertengkar menentukan di RT mana lokasi titik pengeboaran air berada.

Buku ini memperlihatkan bahwa persoalan pemenuhan air bersih bagi warga bukan hanya persoalan teknis belaka yang menjadi ranahnya para insinyur dan para tukang. Sebaliknya penyediaan fasilitas air bersih meliputi beragam aspek sosial dan politik, termasuk juga pragmatisme warga. Tanpa keterampilan pengelolaan hal tersebut, upaya pemenuhan kebutuhan dasar ini akan berujung pada kegagalan. Secara akademik penggunaan satu pendekatan atau perspektif atas persoalan lintas disiplin ini tidak mencukupi kalau hanya dilakukan dari satu disiplin keilmuan saja (teknis saja, atau sosial saja). Pemahaman penyediaan air bersih membutuhkan pendekatan multi disiplin, baik untuk keperluan analisa, maupun untuk keperluan praktis implementasi kebijakan di lapangan. Dari buku ini kita belajar bagaimana para ahli dalam beragam ilmu perlu saling berkolaborasi guna memastikan impian warga akan pemenuhan air bersih dapat berlangsung.

Dalam khazanah keilmuan, kajian lintas disiplin dalam isu air bersih antar ilmu teknis dan ilmu sosial telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Kajian ini sering disebut “ekologi politik” merujuk pada (definisi). Pendekatan ini tidak memisahkan aspek “nature” (alam), dan “sosial” dan fokus pada bekerjanya kekuasaan berbasis fenomena ekologi ini. Sehingga sering kali disebut juga sebagai pendekatan “socio-nature” karena menekankan interkoneksi antara dua elemen alam (*nature*) dan sosial (*culture*) ini dalam memahami fenomena ekologi, termasuk penyediaan air bersih.

Kalangan akademisi progresif lintas disiplin ini (kebanyakan dihuni oleh para geografer) telah ada banyak menurunkan teori yang prinsip nya menyambungkan antara aspek teknis ke-air-an dan aspek

sosial/politiknya, termasuk konteks operasi kapitalisme. Salah satunya konsep yang banyak digunakan dalam kajian politik air ini adalah “water circulation” (sirkulasi air). Konsep ini mendeteksi aliran air secara alamiah mulai dari sumbernya (mata air) sampai dengan saat ia kembali ke alam dalam bentuk limbah.

Nature’s water is captured, pumped, purified, chemically adjusted, piped, bought and sold, regulated, used by households, agriculture and industry, transformed into electricity, biochemically metabolized by plants, animals and humans, integrated in public displays like fountains, often turned into sewage, eventually returned to ‘nature’ (Swyngebouw, 2004: 1)

Di antara keseluruhan proses ini tidak ada berlangsung praktek teknis, melainkan juga praktek sosial dan politik atau kekuasaan. Proses mendapatkan air, memompanya, memurnikannya, menyalurkannya lewat pipa, dan menjual air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industry, bekerja praktek pengaturan (*regulatory*) yang dilakukan oleh negara dan kesediaan/penolakan citizens. Berapa harga izin penguasaan sumber mata air? Apakah air yang dipompa bersumber pada air bawah tanah, yang punya dampak ekologi jangka panjang? Apakah aspek kimiawi air telah diketahui oleh dinas setempat? Bagaimana pengelolaan limbah dilakukan? Dst.

Cara pandang “water circulation” ini sering disebut juga sebagai “water metabolism”. Meski konsep ini banyak digunakan dalam kajian tata Kelola air di perkotaan, ia berguna juga digunakan dalam memahami politik air di desa. Intinya sama yakni soal sirkulasi air yang “masuk kdesa, *melalui* desa, dan *keluar* dari desa”. Konsep ini menurut hemat

saya sangat berguna untuk mengidentifikasi beragam aspek kekuasaan dalam proses sirkulasi alamiah air. Dari proses natural ini, kita dapat mengidentifikasi beragam praktek politik yang bekerja di dalamnya, apakah oleh negara, oleh warga, atau oleh mekanisme pasar melalui perusahaan besar dan kecil. Di titik ini pula lah Swyngebouw (2004) menawarkan konsep relasi *triadic* dalam pengelolaan air bersih, yakni antara kekuasaan-uang-air (*power-money-water*). Baginya pemahaman bersifat *triadic* ini bersifat komprehensif dalam memahami politik air.

Tawaran Swyngebouw ini memang spesifik pada isu komersialisasi air, dan mungkin tidak terlalu terkait dengan fokus buku ini, yakni peran *agency* dalam penyediaan air bersih bagi warga desa. Menggunakan teori Bourdieu, penulis berargumen sang Kepala Desa mampu mengkombinasikan beragam jenis kapital, dalam situasi yang spesifik dan mentransformasikannya menjadi kekuatan baru (bab VII). Dengan cara berbeda, menggunakan analisa “siklus alamiah” perjalanan air dari alam Kembali ke alam, sebagaimana dikutip di paragraf di atas. Jenis modal sang kepala desa terentang dan relevan dalam proses sirkulasi alamiah air ini: Ia memahami aspek teknis, sekaligus aspek politis yang secara tidak langsung terkandung di dalamnya. *Kedua*, dari pemaparan buku ini dapat ditangkap bahwa terkait tipe kapital sang Kepala Desa, terlihat ada akumulasi (tumpukan) aspek *triadic* antara air, kekuasaan dan uang/kapital. Sang kepala desa yang menjadi *agency* dalam pemenuhan air bersih ini adalah pemegang kekuasaan (sebagai kepala desa), pemegang kapital (sebagai pengusaha alat eksplorasi air), dan pemilik keterampilan teknis akan air. Dengan kata lain, bukan hanya ia menguasai beragam tipe kapital dan kemampuannya mentransformasi/

mengkombinasi tipe kapital tersebut, beriringan dengan penguasaannya atas siklus alamiah air. Ini lah sesungguhnya habitat sang Kepala Desa: dunia ke-air-an.

Referensi

Swyngedouw, Erik (2004), *Social Power and the Urbanization of Water*: Flows of Water. Oxford University Press.

DAFTAR ISI

Prolog	vi
Mukadimah.....	ix
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi.....	xxiii

BAB I NESTAPA AIR BERSIH DI JEJANGKIT TIMUR..... 1

Krisis Air Bersih di “Kampung Dolar”	1
Problematika Layanan Air Bersih di Ujung Barat Kalimantan Selatan	5
Bom Waktu Darurat Air Bersih: Ironi yang Tak Terperi di Negara Maritim.....	8

BAB II DESA TEKNOVATIF: PROGRESIVITAS

MELAWAN KEKALAHAN..... 15

KLIK ME, BUMDes Bersinar Desaku Desa Muara Enggelam Kelola Listrik Komunal.....	20
BUMDes Mandiri Sejahtera Ubah Limbah Tanaman dan Plastik Jadi Bernilai.....	23

Desa Berdaya Pulih, Desa Harapan Jaya Sukses Kelola Lahan Gambut dan Cegah Kebakaran Hutan.....	25
Clorin Difuser, Inovasi Warga Desa Tritih Wetan yang Mampu Bersihkan Aneka Bakteri Sumur di Wilayah Permukiman Padat	28
Kelompok Cipta Karya, Desa Bukian Ciptakan Teknologi Kincir untuk Penjernihan Air yang Ramah Lingkungan	31
Kisah Sukses Balunganyar sebagai Desa Inovatif energi.....	34

BAB III SELAYANG PANDANG STATISTIK DESA

JEJANGKIT TIMUR.....	39
Orbitasi.....	39
Batas Wilayah.....	40
Luas Wilayah.....	40
Sumber Daya Air.....	41
Sumber Daya Manusia	41

BAB IV PROFIL IPAB JEJANGKIT TIMUR

Analisis Kuantitas Air	53
Jumlah Pemakaian Air.....	55
Kinerja IPAB.....	56

**BAB V GENELOGI IPAB JEJANGKIT TIMUR:
DARI PETAKA MENJADI BONANZA..... 59**

Program Unggulan Nasional Berbasis Layanan Air Minum
dan Sanitasi..... 61
Jalan Panjang Muammar Menggeluti Pengolahan Air Bersih 65

**BAB VI KOMPLEKSITAS TANTANGAN
PEMBANGUNAN IPAB..... 69**

Rintangan Pertama..... 69
Rintangan Kedua 76
Rintangan Ketiga 77
Permasalahan Keempat..... 79
Permasalahan Kelima..... 80
Permasalahan Keenam..... 82

**BAB VII BOURDIEU: “JUGGERNAUT” OPOSISI
BINER ILMU SOSIAL..... 84**

Biografi Singkat sang “Diktator-Intelektual” 92
Konsep Primer: Habitus, Modal dan Ranah 97

BAB VIII MENYIBAK TABIR DOMINASI KUASA..... 111

Tempaan Kehidupan Pembentuk Habitus 112
Modal sebagai Elemen Kuasa Agen..... 119

Dominasi Kuasa: Permainan Habitus, Penempatan Modal
dalam Arena yang Tepat 126

BAB IX EPILOG 137

Modernisasi Ekologi: Negara Bukanlah Aktor Tunggal
dalam Reformasi Lingkungan..... 139

Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi Ekologi di Ranah Lokal.....142

DAFTAR PUSTAKA 147